

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERANAN CAMAT  
DALAM PEMBUATAN E-KTP  
(Study : Di Kecamatan Gunung Meriah)**

**Skripsi**

**Diajukan Guna Memenuhi Kewajiban dan Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Dalam Ilmu Hukum Administrasi Negara**

**OLEH**

**CHAIRIL AKBAR PURBA  
NPM : 09.840.0153**

**BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERANAN CAMAT  
DALAM PEMBUATAN E-KTP (STUDY DI  
KECAMATAN GUNUNG MERIAH)**

Nama : **CHAIRIL AKBAR PURBA**

N P M : **09.840.0153**

FAKULTAS : **HUKUM**

BIDANG STUDI : **Hukum Administrasi Negara**

Disetujui oleh:  
Komisi pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(H. ABDUL MUTHALIB, SH, M.AP)

(TAUFIK SEREGAR, SH, M. Hum)

  
DEKAN  
(PROF. DR. SYAMSUL ARIFIN, SH. MH)

Tanggal Lulus : 3 Juni 2014

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, .....

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Chairil Akbar Purba".

**(Chairil Akbar Purba)**

**098400153**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERANAN CAMAT DALAM**  
**PEMBUATAN E-KTP**  
**(STUDY : KECAMATAN GUNUNG MERIAH**

**OLEH**  
**CHAIRIL AKBAR PURBA**  
**NPM : 09.840.0153**

**BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Pelayanan kepada masyarakat dalam beberapa tahun terakhir banyak menyita perhatian berbagai pihak yang menyoroti masih lemahnya kinerja pelayanan yang diberikan aparat pemerintah. Tuntutan ini sejalan dengan wacana mengenai good governance yang berhubungan dengan pembuatan KTP, yang menggariskan perlunya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan memperhatikan pelayanan kepada para stakeholders, khususnya masyarakat.

Kecamatan sebagai bagian dari struktur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat terdepan setelah kelurahan dalam mengurus berbagai kepentingan publik. Hal ini disebabkan terdapatnya hubungan hirarkis antara kecamatan dengan kelurahan. Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota (kewenangan delegatif), pemimpin kecamatan dapat melaksanakan berbagai peran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Perbedaan kondisi dan karakteristik wilayah yang menuntut camat untuk dapat memahami kemudian menerjemahkannya ke dalam unit-unit internal organisasi yang ada di kecamatan.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya pelayanan E-KTP oleh aparatur pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti Peraturan Presiden No 35 tahun 2010 menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip.

# DAFTAR ISI



<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KECAMATAN DI INDONESIA</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Pemerintahan Kecamatan .....	11
B. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan .....	13
C. Struktur Organisasi Kecamatan .....	29
D. Sejarah Singkat Kecamatan Gunung Meriah .....	30
<b>BAB III PEMBUATAN E-KTP DI INDONESIA</b> .....	<b>32</b>
A. Sejarah KTP .....	32
B. Sejarah Pembuatan E-KTP .....	36
C. Fungsi dan Kegunaan E-KTP .....	42
D. Proses Penerbitan E-KTP.....	45

<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM TERHADAP KECAMATAN DALAM PEMBUATAN E-KTP .....</b>	<b>47</b>
	A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kecamatan Gunung Meriah Pada Penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) .....	47
	B. Kendala dan Hambatan Dalam Pembuatan E-KTP di Kecamatan Gunung Meriah .....	53
	C. Konsekuensi (akibat hukum) Bagi Penduduk Kecamatan Gunung Meriah yang belum Memperoleh E-KTP .....	55
	D. Peranan Camat Dalam Pembuatan E-KTP Menuju Good Government.....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
	A. Kesimpulan .....	70
	B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya, perlindungan dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan penulisan sebuah karya tulis yaitu skripsi, untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, Dalam Hal ini penulis sudah bekerja sebaik mungkin dalam penyusunan skripsi, namun karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis pastilah ada kesalahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat korektif dan konstruktif dengan kesempurnaan dari skripsi ini.

Skripsi ini juga terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan dan dorongan, saran, nasehat, fasilitas, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof.H.Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi dan juga sebagai Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Abi Jumroh, Selaku Sekretaris yang juga memberikan petunjuk arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak H. Abdul Muthalib, SH., M.AP, Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Dukungan terbesar dari keluarga besar penulis, terutama kedua orang tua tercinta Arifin Purba dan Rohani. Ayah engkau telah mendidik anak mu ini tentang kehidupan, walaupun terkadang caranya sangat keras, tapi ku yakin harapanmu agar anakmu lebih bertanggung jawab dalam hidup, bunda kelembutan hatimu yang selalu penyejuk dihatiku walaupun seluruh dunia membenciku engkau masih tetap mengatakan aku adalah anakmu yang tersayang. Terimakasih Ayah dan bunda, teruslah bimbing anak mu ini karena kami tahu ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa tergantung kepada ridho ayah dan bunda.
7. Terimakasih juga kepada Kakaku tersayang Kiki Amelia Boru Purba & Fifi Ariyanti Br. Purba serta Adik Try Putri br. Purba, do'akan agar saya berhasil agar kelak dapat menjadi seseorang yang dapat berguna bagi keluarga.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat. Semoga sukses dalam meraih cita-citanya

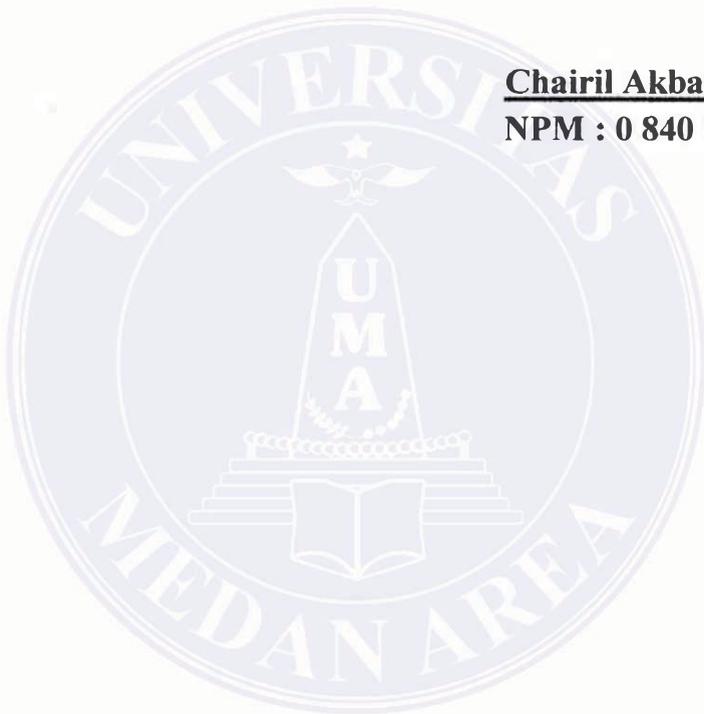
Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang membantu member semangat, dukungan, saran maupun doa. Penulis juga dengan kerendahan hati banyak membutuhkan saran, kritik, yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sebagai penutup, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, April 2014

Penulis

**Chairil Akbar Purba**

**NPM : 0 840 0153**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kecamatan sebagai bagian dari struktur dan system penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat terdepan setelah kelurahan/desa dalam mengurus berbagai kepentingan publik. Hal ini disebabkan terdapatnya hubungan hirarkis antara kecamatan dengan kelurahan/desa. Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota (kewenangan delegatif), pemimpin kecamatan dapat melaksanakan berbagai peran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Perbedaan kondisi dan karakteristik wilayah yang menuntut camat untuk dapat memahami kemudian menerjemahkannya ke dalam unit-unit internal organisasi yang ada di kecamatan.

Hal ini dapat kita analisis pada pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintahan” dan ayat 2 bahwa “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah”

Kecamatan dilihat dari system pemerintahan Indonesia, merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat

luas. Kedudukan Kecamatan dalam hierarki pemerintahan kita memiliki peranan strategis di dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan kita.

Salah satu tugas administrasi pemerintahan yang dibebankan kepada kecamatan adalah program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disebut juga E-KTP. Program E-KTP ini merupakan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mana memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. E-KTP adalah kartu tanda penduduk elektronik yaitu, alat teknologi komunikasi pada era modern ini yang sangat populer di seluruh dunia misalnya di negara-negara China, India, Jerman dan beberapa negara lainnya.<sup>1</sup>

E-KTP merupakan system kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasal 101 huruf a menjelaskan bahwa “Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat 5 (lima) tahun”. Hal ini berarti memerintahkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. Selain itu, Undang-Undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, dan kemudian Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

---

<sup>1</sup> <http://capil.muaraenimkab.go.id/e-ktp-indonesia-masih-lebih-murah/> (diakses pada tanggal 3 Desember 2013)

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian. Pustaka Belajar. Yogyakarta. 2002*
- Damin, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif. Pustaka Setia. Bandung. 2002*
- Dani, K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Putra Harsa, Surabaya, 2002*
- DR. H. Amin Ibrahim, MA. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung. 2008*
- Drs. H. Surjadi, Msi *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung. 2009*
- Gie The Liang, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jilid III, Liberty, Yogyakarta*
- H.R.Ridwan, *Hukum administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006*
- Indarwanto, *Prilaku Birokrasi. Bandung Citra Aditya Bakti, 2000.*
- Irfan Islamy, M.Dr., *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara, Malang, 1998.*
- Koswara, E, *Teori Pemerintahan Daerah, IIP Press, Jakarta, 2007*
- Krishna D.Darmurti & Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan, Pemikiran dan Pelaksanaan , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.*
- M. Ryaas Rasyid, *Reformasi Politik & Ekonomi , Widyapraja no. 30, Jakarta 1998.*
- Maister, David H., *True Professionalism: The Courage to Care About Your People, Your Clients and Your Career, Jurnal, 1997.*
- Moeljarto Rjkrowinoto, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan, Yogyakarta, Pustaka Belajar offset, 1999*

- Nurul Aini, Fungsi-Fungsi Pemerintahan , Jakarta, Badan Diklat DDN, 1997.
- Osborne, David & Plastrik, Pter, Memangkas birokrasi: Lima strategi menuju pemerintahan wirausaha, Jakarta Penerbit PPM 2000.
- Prasodjo Eko, dkk, Kinerja Aparatur Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik, Yappinka, Jakarta 2006
- Prasodjo Eko, dkk. Kinerja Aparatur Pemerintah Terhadap Pelayanan Publik. Yappinka. Jakarta. 2006
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- R.E. Indrajit, Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Andi Offset, Yogyakarta, 2002
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, Managemen Pelayanan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005.
- Roni Ekha Putera, Tengku Rika Valentina, Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan, Jurnal Mimbar, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011)
- Samidjo, Ilmu Negara, CV. Armico, Bandung, 2002
- Setyawan salam Darma, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004
- Soekanto Sorjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2008

[http://griyapmiasri.wordpress.com/2013/06/04/penjelasan-dan-hambatan-penerbitan -  
e-ktp/](http://griyapmiasri.wordpress.com/2013/06/04/penjelasan-dan-hambatan-penerbitan-e-ktp/)

[https://www.google.com/search?client=opera&q=sejarah+ktp&sourceid=opera&ie=UTF-8 &oe=UTF-8#q=sejarah+ktp+di+indonesia&start=209](https://www.google.com/search?client=opera&q=sejarah+ktp&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=sejarah+ktp+di+indonesia&start=209)

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia>

